

Asesmen Transmisi Suku Bunga Kebijakan Kepada Suku Bunga Dasar Kredit Perbankan

Juli 2026



SBDK sedikit meningkat pada Mei 2026 seiring dengan kenaikan biaya dana dan biaya overhead.

- ***SBDK perbankan pada Mei 2026 meningkat seiring dengan kenaikan biaya dana (HPDK) dan biaya overhead (OHC), sementara perbankan masih menyerap sebagian tekanan biaya melalui penyesuaian margin.***
- ***Suku bunga kredit Rupiah meningkat sejalan dengan kenaikan suku bunga kredit baru didorong oleh meningkatnya biaya pendanaan dan penyesuaian pricing risiko, namun pertumbuhan kredit tetap kuat sehingga fungsi intermediasi perbankan tetap terjaga.***
- ***Suku bunga kredit sektor prioritas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) tetap lebih rendah dari rata-rata suku bunga kredit industri perbankan dengan kualitas kredit yang terjaga, mencerminkan dukungan likuiditas KLM dalam menjaga pembiayaan sektor prioritas di tengah meningkatnya biaya dana.***

Perkembangan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)¹ Mei 2026

SBDK perbankan pada Mei 2026 meningkat secara terbatas didorong oleh kenaikan biaya dana dan biaya operasional, serta penyesuaian strategi *pricing* perbankan di tengah kebutuhan pendanaan yang meningkat dan kondisi likuiditas yang menurun. Berlanjutnya transmisi kebijakan moneter melalui kenaikan BI-Rate memberikan dampak terhadap kenaikan biaya dana, meskipun besaran penyesuaian SBDK berbeda antarkelompok bank sesuai dengan karakteristik struktur pendanaan, kondisi likuiditas, dan strategi bisnis masing-masing bank. Pada Mei 2026, SBDK tercatat sebesar 8,65%, atau naik dari 8,62% pada bulan sebelumnya, seiring dengan kenaikan BI-Rate pada Mei 2026 menjadi 5,25% dari 4,75% pada April 2026 (**Grafik 1**)². Peningkatan tersebut mencerminkan mulai meningkatnya biaya pengumpulan dana akibat persaingan dalam memperoleh Dana Pihak Ketiga (DPK) serta kebutuhan pendanaan untuk mendukung pertumbuhan kredit. Kenaikan biaya dana tersebut kemudian mulai ditransmisikan secara bertahap ke biaya kredit melalui penyesuaian SBDK. Namun demikian, peningkatan SBDK masih berada pada level yang relatif kompetitif sehingga belum menghambat intermediasi perbankan. Hal ini tecermin dari pertumbuhan kredit yang meningkat menjadi 11,51% (yoy) pada Mei 2026 dari 9,98% (yoy) pada April 2026. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa transmisi kenaikan biaya dana terhadap suku bunga kredit masih berlangsung secara bertahap karena perbankan tetap mempertimbangkan daya saing pembiayaan dan prospek permintaan kredit.

Secara umum, penyesuaian SBDK mencerminkan respons perbankan terhadap meningkatnya biaya dana, biaya operasional, dan dinamika likuiditas, dengan kenaikan BI-Rate sebagai salah satu faktor yang memperkuat proses

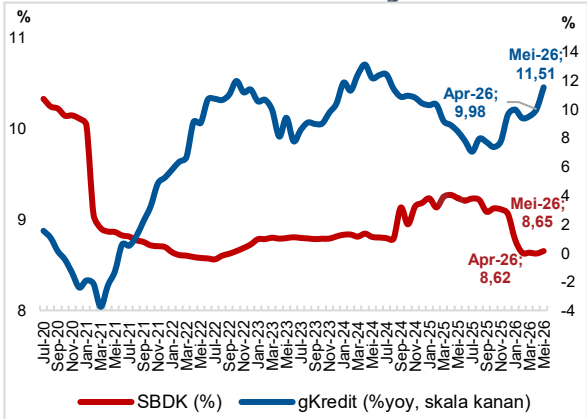
¹ SBDK merupakan suku bunga dasar kredit yang dipublikasikan oleh bank sesuai dengan Peraturan OJK No.13 Tahun 2024 tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Kredit. SBDK digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan pada nasabah, namun belum mencakup premi risiko yang dapat bervariasi untuk setiap debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur secara umum tidak sama dengan SBDK. Periode asesmen menggunakan data SBDK yang tersedia hingga publikasi laporan.

² Sejak Oktober 2024, komponen pembentuk SBDK mengalami perubahan dan penyesuaian sejalan dengan pengaturan dalam POJK No.13 Tahun 2024 tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit. Lebih lanjut, angka SBDK Oktober 2024, November 2024 dan Desember 2024 disajikan ulang sejalan dengan koreksi data yang disampaikan bank pelapor pada periode dimaksud.

transmisi. Oleh karena itu, besaran penyesuaian SBDK tidak sepenuhnya seragam dan bergantung terhadap struktur pendanaan, akan tetapi turut dipengaruhi oleh efisiensi operasional, profil risiko, serta strategi bisnis masing-masing bank.

Berdasarkan kelompok bank, kenaikan SBDK perbankan pada Mei 2026 dikontribusikan oleh kelompok bank BUMN, sedangkan kelompok bank lainnya menunjukkan perkembangan yang beragam sesuai dengan kondisi likuiditas, struktur pendanaan, dan strategi bisnis masing-masing bank. Pada Mei 2026, SBDK kelompok bank BUMN meningkat menjadi 8,84%, dari 8,78% pada April 2026 (**Grafik 2**). Sementara itu, kelompok BPD dan BUSN mempertahankan SBDK masing-masing sebesar 9,09% dan 8,43%, sedangkan kelompok KCBA menurunkan SBDK menjadi 5,16%, dari 5,19% pada bulan sebelumnya. Perbedaan perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kenaikan biaya dana tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan BI-Rate, tetapi juga oleh struktur pendanaan, biaya operasional, kondisi likuiditas, profil risiko, dan strategi penyaluran kredit masing-masing kelompok bank. Kelompok bank yang menghadapi tekanan biaya dana lebih besar cenderung menyesuaikan SBDK lebih tinggi, sedangkan bank yang memiliki pangsa dana murah (CASA) yang kuat dan likuiditas yang memadai memiliki ruang lebih besar untuk mempertahankan atau menurunkan SBDK guna menjaga daya saing kredit. Ke depan, ruang penyesuaian SBDK akan dipengaruhi oleh perkembangan biaya pendanaan, kondisi likuiditas, dinamika penghimpunan dana, serta ketidakpastian pasar keuangan global yang dapat memengaruhi biaya dana perbankan. Apabila tekanan biaya dana terus meningkat sementara ruang efisiensi semakin terbatas, penyesuaian SBDK berpotensi berlanjut secara bertahap.

Grafik 1. Perkembangan SBDK*

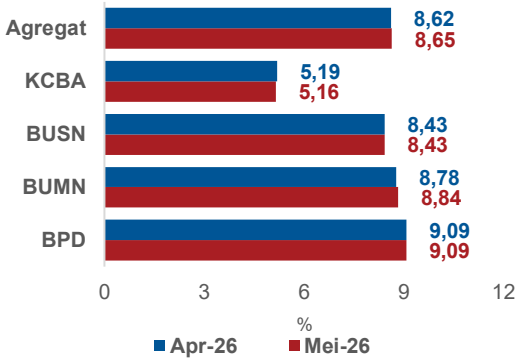


*Berdasarkan ketentuan OJK

Sumber: OJK (diolah)

Grafik 2. SBDK Mei 2026*

Berdasarkan Kelompok Bank (%)



*Berdasarkan ketentuan OJK

Sumber: OJK (diolah)

Perkembangan Komponen Pembentuk SBDK³

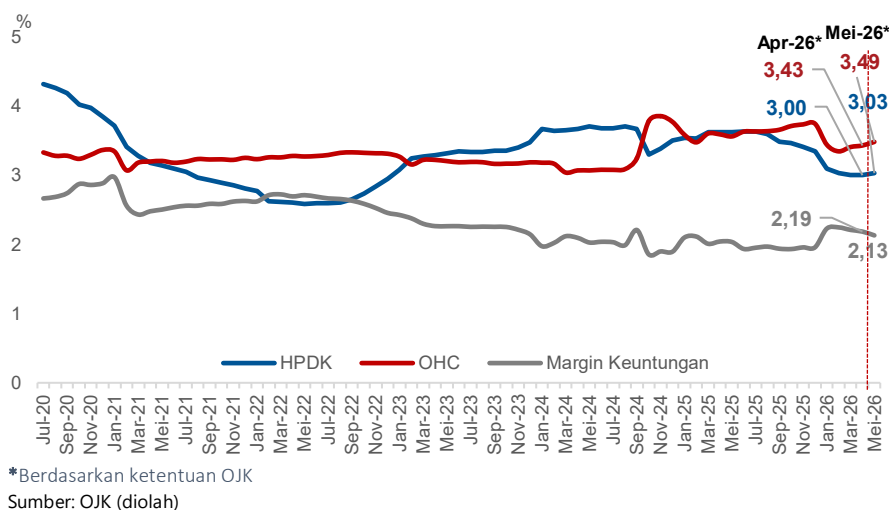
Kenaikan SBDK pada Mei 2026 didorong oleh peningkatan biaya dana (HPDK) dan biaya operasional seiring dengan kenaikan beban promosi serta belanja barang dan jasa. Pada Mei 2026, HPDK meningkat menjadi 3,03%

³ SBDK terdiri dari tiga komponen pembentuk, yaitu Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) yang terdiri dari DPK (Biaya DPK, biaya giro wajib minimum, biaya premi LPS) dan Biaya non-DPK (Biaya liabilitas kepada Bank Indonesia dan bank lain, Biaya surat-surat berharga yang diterbitkan, Biaya dana pinjaman yang diterima, dan lainnya), Biaya overhead (OHC) yang terdiri dari Perubahan nilai wajar liabilitas, Kerugian risiko operasional, Komisi/provisi/fee dan administrasi, Penyusutan/amortisasi, kerugian penurunan nilai aset nonkeuangan, Beban tenaga kerja, Beban promosi, Kerugian penjabaran transaksi valas, Beban lainnya, dan Biaya overhead lainnya, dan Margin keuntungan, yang ditetapkan oleh bank dalam penyaluran kredit.

dari 3,00% pada bulan sebelumnya. Peningkatan tersebut mencerminkan meningkatnya biaya penghimpunan dana sebagai dampak dari persaingan pendanaan di tengah kondisi likuiditas perbankan yang menurun. Sementara itu, OHC meningkat menjadi 3,49% pada Mei 2026, dari 3,43% pada April 2026, terutama dipengaruhi oleh komponen biaya promosi, belanja barang dan jasa, serta taksiran pajak tahun berjalan. Akumulasi kenaikan HPDK dan OHC tersebut menyebabkan margin keuntungan perbankan menurun menjadi 2,13% pada Mei 2026, dari 2,19% pada bulan sebelumnya (**Grafik 3**). Penurunan margin keuntungan menunjukkan bahwa perbankan belum sepenuhnya meneruskan kenaikan biaya kepada debitur, tetapi masih menyerap sebagian biaya tersebut guna menjaga daya saing suku bunga kredit dan mendukung keberlanjutan intermediasi.

Secara keseluruhan, perkembangan komponen pembentuk SBDK menunjukkan bahwa kenaikan biaya dana dan biaya operasional menjadi faktor utama yang mendorong penyesuaian suku bunga kredit. Namun demikian, kemampuan masing-masing bank dalam menjaga efisiensi operasional, memperkuat struktur pendanaan, dan mengelola profitabilitas akan menentukan besaran penyesuaian SBDK di masa mendatang.

Grafik 3. Perkembangan Komponen Pembentuk SBDK*



Peningkatan HPDK pada Mei 2026 terutama dikontribusikan oleh kenaikan biaya dana pada kelompok BUMN. Berdasarkan kelompok bank, HPDK kelompok BUMN meningkat dari 2,77% pada April 2026 menjadi 2,84% pada Mei 2026 (**Grafik 4**). Peningkatan tersebut antara lain dipengaruhi oleh perubahan struktur pendanaan menyusul tambahan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) Pemerintah sebesar Rp110 triliun pada akhir Mei 2026 yang sebagian besar ditempatkan dalam bentuk deposito. Komposisi pendanaan tersebut meningkatkan biaya penghimpunan dana sehingga mendorong kenaikan HPDK. Di sisi lain, kelompok BPD dapat mempertahankan HPDK pada level 3,48%, mencerminkan biaya pendanaan yang relatif terjaga. Sementara itu, HPDK kelompok BUSN dan KCBA masing-masing tercatat sebesar 3,22% dan 1,88%, atau turun dari 3,23% dan 1,88% pada bulan sebelumnya. Hal tersebut didukung oleh penurunan biaya tabungan pada kelompok BUSN serta meningkatnya proporsi dana murah (CASA) kelompok KCBA yang tercatat sebesar 79,87% pada April 2026 menjadi 81,28% pada Mei 2026. Secara umum, perkembangan HPDK menunjukkan bahwa kemampuan bank dalam mengelola struktur pendanaan menjadi faktor penting. Bank dengan pangsa CASA yang tinggi dan sumber pendanaan yang lebih stabil

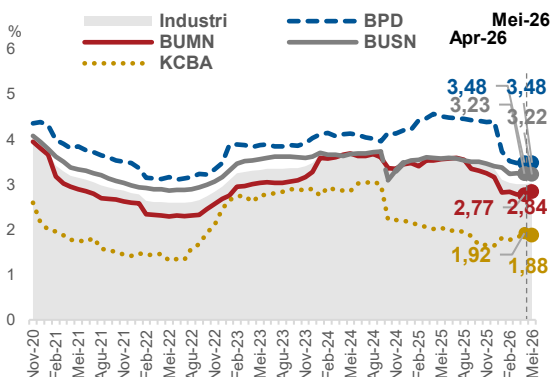
cenderung memiliki ruang lebih besar untuk menahan kenaikan biaya dana, sedangkan bank yang lebih bergantung pada dana berbiaya tinggi akan menghadapi tekanan yang lebih besar terhadap biaya kredit.

OHC perbankan pada Mei 2026 tercatat meningkat pada hampir seluruh kelompok bank, didorong oleh kenaikan beban promosi dan beban lainnya. Perbedaan tingkat efisiensi operasional perbankan menyebabkan besarnya kenaikan OHC bervariasi antar kelompok bank. Secara industri, OHC tercatat sebesar 3,49% pada Mei 2026, atau naik dari 3,43% pada April 2026 (**Grafik 5**). Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan beban promosi, dan beban lainnya yang meliputi belanja barang dan jasa, serta taksiran pajak tahun berjalan. Kelompok bank BUMN mencatat kenaikan OHC terbesar yakni menjadi 3,76% dari 3,66%, diikuti kelompok KCBA menjadi 1,76% dari 1,73%, dan BUSN menjadi 3,16% dari 3,15%. Sebaliknya, kelompok BPD menjadi satu-satunya kelompok bank yang mencatat penurunan OHC menjadi 3,62% dari 3,64%, yang mengindikasikan adanya efisiensi biaya operasional. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa selain biaya dana, efisiensi operasional juga berperan penting dalam menentukan ruang penyesuaian suku bunga kredit. Bank yang mampu menjaga efisiensi operasional memiliki fleksibilitas lebih besar untuk mempertahankan suku bunga kredit yang kompetitif meskipun menghadapi tekanan kenaikan biaya pendanaan.

Penurunan margin keuntungan pada Mei 2026 mencerminkan upaya perbankan dalam menjaga daya saing suku bunga kredit seiring dengan kenaikan biaya dana dan biaya operasional, terutama pada kelompok BUMN dan KCBA. Secara industri, margin keuntungan turun menjadi 2,13% pada Mei 2026 dari 2,19% pada bulan sebelumnya (**Grafik 6**). Penurunan pada bulan Juni 2026 terutama dikontribusikan oleh kelompok BUMN dan KCBA yang masing-masing turun menjadi 2,24% dan 1,52%, dari masing-masing 2,35% dan 1,55% pada April 2026. Pada kelompok BUMN, penurunan margin dipengaruhi oleh kombinasi kenaikan biaya dana dan biaya operasional, sedangkan pada kelompok KCBA terutama dipengaruhi oleh meningkatnya biaya operasional. Sebaliknya, margin keuntungan pada kelompok BUSN dan BPD meningkat tipis masing-masing menjadi 2,05% dan 1,99%, dari masing-masing sebesar 2,04% dan 1,98% pada bulan sebelumnya. Hal tersebut didukung oleh efisiensi biaya dana pada kelompok BUSN serta efisiensi operasional melalui penurunan beban promosi pada kelompok BPD. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kemampuan menjaga efisiensi menjadi faktor penting dalam mempertahankan profitabilitas tanpa perlu menaikkan suku bunga kredit secara signifikan.

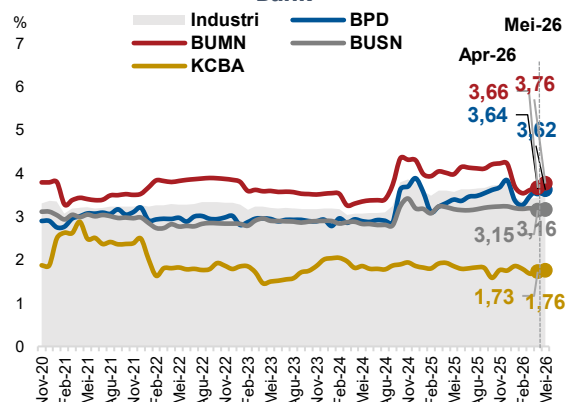
Secara umum, perkembangan HPDK, OHC, dan margin keuntungan menunjukkan bahwa transmisi kenaikan biaya dana terhadap suku bunga kredit telah berlangsung, namun belum sepenuhnya diteruskan kepada debitur. Sebagian tekanan biaya masih dikompensasikan melalui penyesuaian margin keuntungan sehingga kenaikan SBDK masih terbatas. Selanjutnya, apabila tekanan biaya dana terus berlangsung sementara ruang efisiensi semakin terbatas, maka potensi penyesuaian SBDK dan suku bunga kredit perlu dicermati lebih lanjut.

Grafik 4. Perkembangan HPDK* Berdasarkan Kelompok Bank



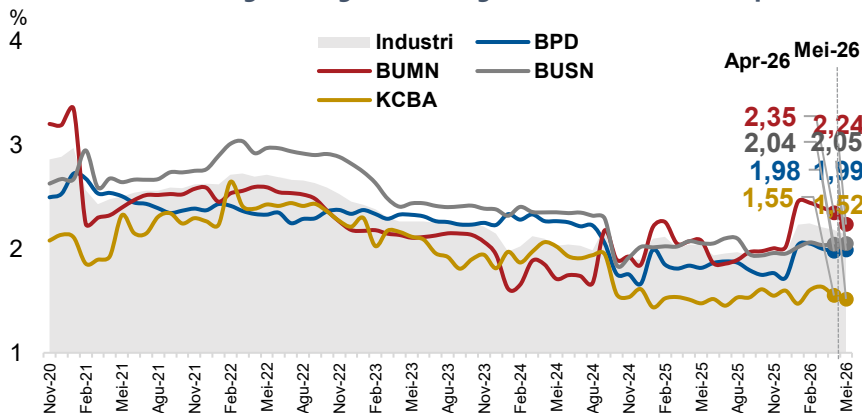
*Berdasarkan ketentuan OJK
Sumber: OJK (diolah)

Grafik 5. Perkembangan OHC* Berdasarkan Kelompok Bank



*Berdasarkan ketentuan OJK
Sumber: OJK (diolah)

Grafik 6. Perkembangan Margin Keuntungan* Berdasarkan Kelompok Bank



*Berdasarkan ketentuan OJK
Sumber: OJK (diolah)

Perkembangan Suku Bunga Kredit

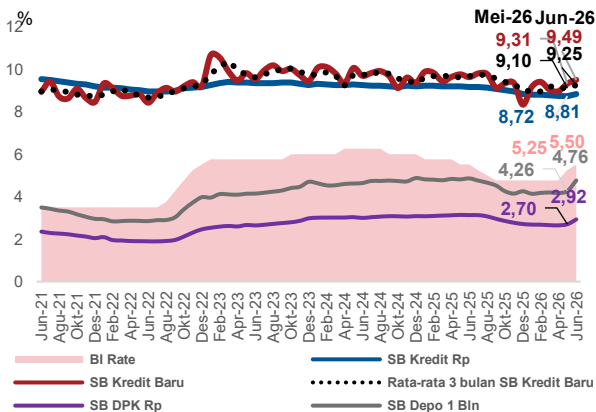
Suku bunga kredit Rupiah meningkat pada Juni 2026 disebabkan oleh kenaikan biaya dana serta penyesuaian persepsi risiko bank. Pada Juni 2026, rata-rata tertimbang suku bunga kredit Rupiah meningkat menjadi 8,81% dari 8,72% pada Mei 2026 (**Grafik 7**). Kenaikan suku bunga kredit tecermin pada meningkatnya suku bunga kredit baru⁴ menjadi 9,49% dari 9,31% pada bulan sebelumnya. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya persaingan di pasar pendanaan di tengah pertumbuhan kredit yang tetap kuat dan kondisi likuiditas yang menurun serta transmisi kenaikan BI-Rate. Di sisi lain, penyesuaian suku bunga kredit juga mencerminkan upaya perbankan dalam menjaga keseimbangan antara peningkatan biaya dana, pengelolaan risiko kredit, dan keberlanjutan profitabilitas. Berdasarkan kelompok bank, pada Juni 2026 kelompok KCBA mencatat kenaikan suku bunga kredit baru paling besar yakni menjadi 8,45%, dari 7,64% pada Mei 2026 (**Grafik 8**), terutama dipengaruhi oleh penyesuaian *pricing* pada kredit konsumsi seiring meningkatnya persepsi risiko pada segmen tersebut.

⁴ Suku bunga kredit baru adalah tingkat harga yang ditetapkan oleh bank selaku kreditur atas fasilitas kredit baru kepada debitur.

Kelompok bank BUMN dan BUSN juga mencatat kenaikan suku bunga kredit baru masing-masing menjadi 8,03% dan 10,99%, dari masing-masing sebesar 7,65% dan 10,88% pada bulan sebelumnya, didorong oleh penyesuaian suku bunga pada sebagian besar segmen kredit sebagai respons terhadap meningkatnya biaya dana. Sebaliknya, kelompok BPD menurunkan suku bunga kredit baru menjadi 8,62% dari 9,18% pada Mei 2026, didukung oleh efisiensi biaya operasional yang memberikan ruang untuk mempertahankan daya saing kredit. Perbedaan respons tersebut menunjukkan bahwa strategi penetapan harga kredit tidak hanya dipengaruhi oleh kenaikan biaya dana, tetapi juga oleh kondisi likuiditas, struktur pendanaan, efisiensi operasional, profil risiko, dan fokus bisnis masing-masing kelompok bank.

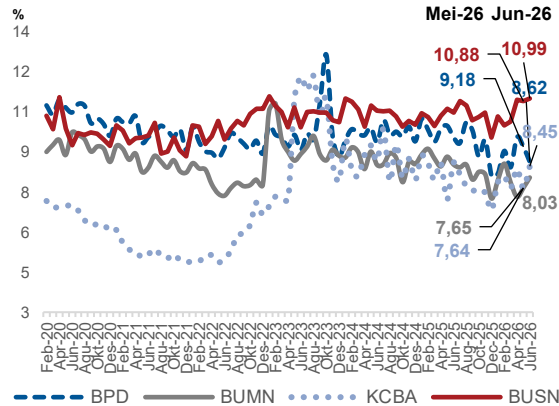
Dari sisi penghimpunan dana, kenaikan suku bunga DPK Rupiah secara bulanan mengindikasikan adanya persaingan penghimpunan dana antara lain untuk mendukung pertumbuhan kredit yang tetap kuat. Suku bunga DPK Rupiah tercatat meningkat sebesar 2,92% pada Juni 2026 dari 2,70% pada Mei 2026 (**Grafik 7**). Kondisi ini menunjukkan bahwa perbankan mulai menghadapi tekanan biaya dana seiring kenaikan suku bunga kebijakan, pertumbuhan kredit yang tetap kuat, serta meningkatnya persaingan penghimpunan dana di tengah kondisi likuiditas yang menurun. Namun demikian, dukungan likuiditas melalui bauran kebijakan Bank Indonesia turut membantu menjaga kecukupan likuiditas perbankan sehingga mampu meredam tekanan kenaikan biaya dana yang lebih besar. Dengan demikian, kenaikan suku bunga kredit masih berlangsung secara bertahap dan belum sepenuhnya mencerminkan besarnya kenaikan biaya dana. Ke depan, kondisi ini akan dipengaruhi oleh dinamika likuiditas, intensitas persaingan penghimpunan dana, kemampuan perbankan menjaga efisiensi biaya, serta prospek permintaan kredit dan kualitas aset.

Grafik 7. Perkembangan Suku Bunga Kredit Rp dan Suku Bunga DPK Rp



Sumber: LBUT Antasena (diolah)

Grafik 8. Perkembangan Suku Bunga Kredit Baru Rp Berdasarkan Kelompok Bank

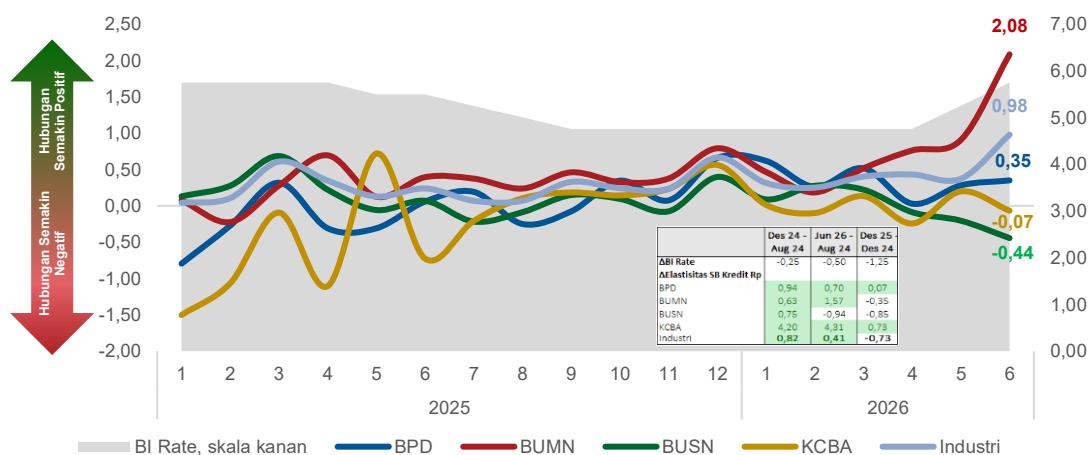


Sumber: LBUT Antasena (diolah)

Perkembangan Elastisitas Suku Bunga Kredit Baru

Elastisitas suku bunga kredit baru terhadap BI-Rate meningkat pada Juni 2026, menunjukkan bahwa transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga terus berlangsung secara bertahap. Namun demikian, besaran transmisi masih bervariasi antar kelompok bank sesuai dengan karakteristik struktur pendanaan, kondisi likuiditas, dan persepsi risiko masing-masing bank. Koefisien elastisitas industri perbankan meningkat menjadi 0,98 pada Juni 2026 (**Grafik 9**), lebih tinggi dari periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 0,24. Peningkatan koefisien elastisitas tersebut mencerminkan bahwa sensitivitas perubahan suku bunga kebijakan terhadap suku bunga kredit baru menjadi lebih responsif dibandingkan dengan periode sebelumnya. Berdasarkan kelompok bank, respons transmisi suku bunga kebijakan berbeda antar kelompok bank, mencerminkan pengaruh struktur pendanaan, kondisi likuiditas, strategi bisnis, dan persepsi risiko dalam menentukan kecepatan maupun besaran penyesuaian suku bunga kredit baru. Kelompok bank BUMN mencatat elastisitas tertinggi, didorong oleh kenaikan suku bunga kredit baru pada hampir seluruh segmen kredit sebagai respons terhadap meningkatnya biaya dana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan biaya dana pada kelompok bank BUMN relatif lebih cepat diteruskan ke harga kredit. Pada kelompok BPD, peningkatan elastisitas terutama dipengaruhi oleh penyesuaian suku bunga kredit dengan tenor lebih panjang yang mempertimbangkan peningkatan risiko kredit serta kebutuhan menjaga keseimbangan antara risiko dan tingkat imbal hasil. Sementara itu, kelompok BUSN mencatat elastisitas negatif akibat penurunan suku bunga kredit baru pada tenor pendek (3–12 bulan) yang memiliki pangsa pencairan cukup besar. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebagian BUSN masih mengutamakan strategi mempertahankan daya saing pasar dibandingkan meneruskan kenaikan biaya pendanaan secara penuh. Ke depan, perkembangan biaya dana, kondisi likuiditas, kualitas aset, dan persaingan penghimpunan dana diperkirakan akan tetap menjadi faktor utama yang memengaruhi kecepatan dan besaran transmisi suku bunga kebijakan ke suku bunga kredit perbankan.

Grafik 9. Elastisitas Suku Bunga Kredit Baru Rupiah Berdasarkan Kelompok Bank



Keterangan:

- Elastisitas dihitung dengan rumus: $(\% \text{ Perubahan SB Kredit Baru Rp}) / (\% \text{ Perubahan BI Rate})$
- Periode dasar yang digunakan saat menghitung elastisitas adalah Agustus 2024, yakni awal periode penurunan BI-Rate.

Suku Bunga Kredit Sektor Prioritas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM)⁵

Kebijakan pemberian insentif berbasis kinerja dan orientasi ke depan (KLM *Forward Looking*) membantu menjaga suku bunga kredit pada sektor prioritas KLM tetap kompetitif di tengah kenaikan biaya dana dan penyesuaian suku bunga kebijakan. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa dukungan likuiditas melalui KLM membantu mengurangi tekanan biaya dana sehingga memberikan ruang bagi perbankan untuk mempertahankan biaya kredit sektor prioritas tetap berada di bawah rata-rata industri. Pada Juni 2026, suku bunga kredit seluruh sektor prioritas KLM masih berada di bawah rata-rata suku bunga kredit industri perbankan, meskipun apabila dilihat secara bulanan mengalami kenaikan pada seluruh kelompok sektor prioritas (**Grafik 10**). Suku bunga kredit sektor Pertanian, Industri Pengolahan, dan Hilirisasi mengalami kenaikan menjadi 8,71% pada Juni 2026 dari 8,64% pada Mei 2026. Pada periode yang sama, sektor Jasa termasuk Ekonomi Kreatif tercatat sebesar 7,89%, atau naik dari 7,76%. Sementara itu, sektor Kontruksi, *Real Estate*, dan Perumahan tercatat naik menjadi 6,86, dari 6,82%. Meskipun demikian, tingkat suku bunga ini masih lebih rendah dari pada suku bunga kredit agregat yakni sebesar 8,81%. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa tambahan likuiditas melalui KLM membantu memperkuat kapasitas pendanaan perbankan sehingga sebagian tekanan kenaikan biaya dana tidak sepenuhnya diteruskan kepada debitur pada sektor prioritas.

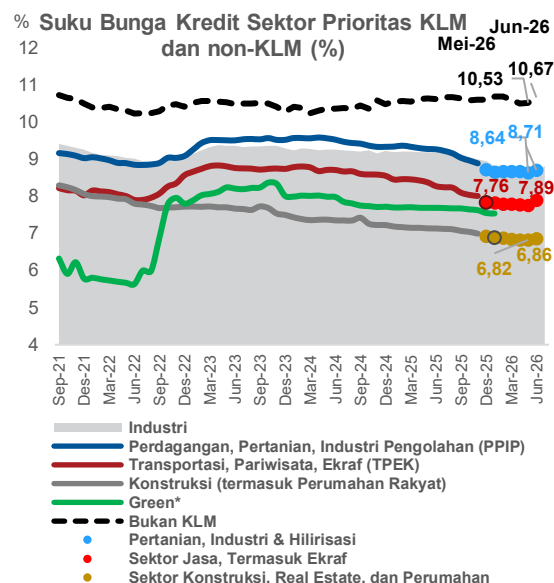
Penyaluran insentif KLM yang terus meningkat memperkuat kemampuan perbankan dalam mendukung pembiayaan sektor prioritas tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian. Hingga minggu pertama Juni 2026, penyaluran insentif KLM mencapai sekitar Rp418,1 triliun, sehingga turut memperkuat likuiditas perbankan dan memperluas kapasitas penyaluran kredit kepada sektor prioritas. Dukungan tersebut memberikan ruang bagi perbankan untuk mempertahankan suku bunga kredit yang kompetitif meskipun menghadapi tekanan biaya dana. Sementara itu, kualitas kredit sektor prioritas tetap terjaga sehingga memberikan ruang bagi perbankan untuk mempertahankan pembiayaan pada sektor-sektor prioritas. Rasio NPL seluruh sektor prioritas tetap berada di bawah 5% (**Grafik 11**), yang menunjukkan bahwa peningkatan suku bunga kredit belum diikuti oleh peningkatan risiko kredit. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa ketahanan debitur pada sektor prioritas masih relatif baik sehingga mendukung keberlanjutan fungsi intermediasi. Ke depan, perbankan tetap perlu mencermati perkembangan prospek usaha dan kemampuan membayar debitur, serta dinamika risiko sektoral mengingat ketidakpastian global masih berpotensi memengaruhi kinerja sektor riil. Penguatan manajemen risiko dan penyaluran kredit yang *prudent* akan menjadi faktor penting untuk menjaga kualitas kredit tanpa mengurangi dukungan terhadap sektor-sektor prioritas.

Sementara itu, segmen UMKM pada Juni 2026 mencatat penurunan suku bunga kredit menjadi 10,34% dari 10,40% pada bulan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan perbaikan rasio NPL menjadi 4,54% pada Juni 2026 dari 4,68% pada Mei 2026. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perbankan masih memberikan dukungan terhadap pembiayaan UMKM sekaligus melakukan pengelolaan risiko kredit secara lebih selektif sesuai dengan profil risiko masing-masing debitur.

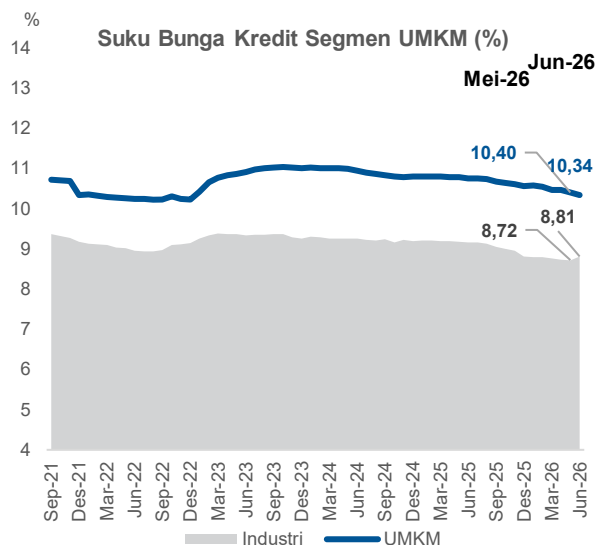
⁵ Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) merupakan insentif yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan melalui pengurangan kewajiban giro bank di Bank Indonesia dalam rangka pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) yang wajib dipenuhi secara rata-rata. Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial. Sejak 1 Desember 2025, terdapat reklasifikasi sektor prioritas yang ditetapkan untuk memperkuat KLM antara lain: (1) sektor Pertanian, Industri & Hilirisasi; (2) sektor Jasa, termasuk Ekonomi Kreatif (Ekraf); (3) sektor Konstruksi, *Real Estate*, dan Perumahan. Selain sektor prioritas di atas, kebijakan KLM juga menysasar segmen UMKM dan Usaha Mikro (UMi).

Secara umum, dukungan likuiditas melalui KLM membantu mengurangi tekanan biaya dana sehingga memberikan ruang bagi perbankan untuk mempertahankan biaya kredit ke sektor prioritas pada level yang kompetitif, sementara kualitas kredit yang tetap terjaga memperkuat keberlanjutan penyaluran kredit ke sektor prioritas.

Grafik 10. Perkembangan Suku Bunga Kredit Pada Sektor Prioritas KLM dan Segmen UMKM

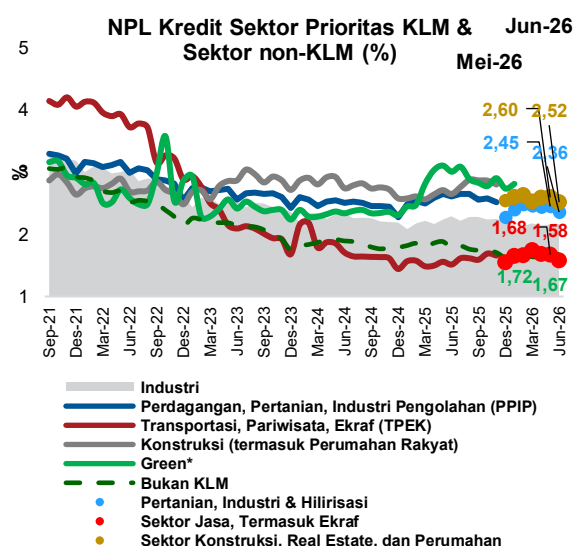


Sumber: LBUT Antasena (diolah)

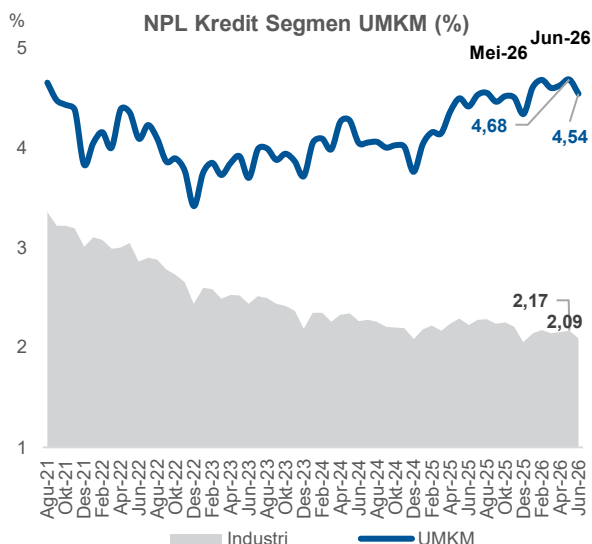


Sumber: LBUT Antasena (diolah)

Grafik 11. NPL Kredit Sektor Prioritas KLM dan Segmen UMKM



Sumber: LBUT Antasena (diolah)

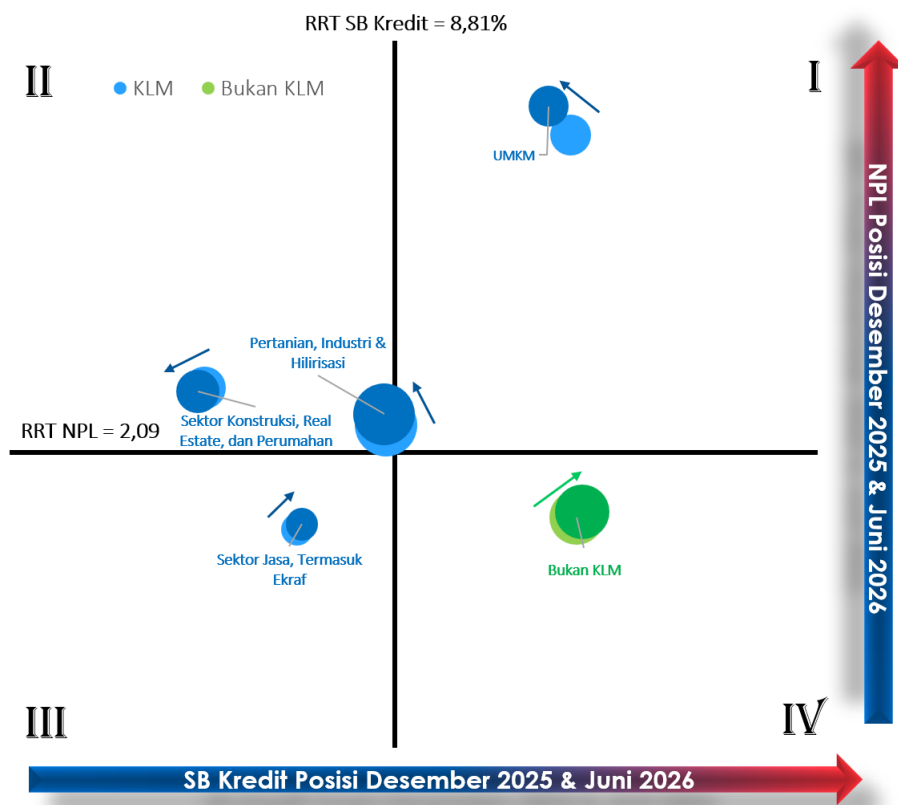


Sumber: LBUT Antasena (diolah)

Dalam perspektif waktu enam bulan terakhir, suku bunga kredit pada mayoritas sektor prioritas KLM tercatat mengalami penurunan. Reklasifikasi sektor prioritas melalui penyaluran KLM *Forward Looking* turut

mendukung penyaluran kredit ke sektor prioritas KLM sehingga menopang pertumbuhan kredit perbankan. Penurunan suku bunga kredit pada sektor prioritas menempatkan sektor prioritas KLM pada kuadran II dan III (**Grafik 12**), yang mencerminkan kombinasi penurunan suku bunga kredit dengan risiko kredit yang relatif terjaga. Secara agregat, rata-rata suku bunga kredit sektor prioritas KLM lebih rendah dari rata-rata suku bunga kredit industri perbankan yang menunjukkan bahwa kebijakan KLM mampu menjaga suku bunga kredit sektor prioritas tetap kompetitif serta mendukung intermediasi perbankan. Sementara itu, pada periode yang sama, sektor non-KLM mulai bergeser menuju kuadran IV mencerminkan kenaikan suku bunga kredit yang lebih tinggi sebagai respons terhadap meningkatnya biaya dana. Pada segmen UMKM, penurunan suku bunga kredit yang terjadi di tengah peningkatan risiko kredit mencerminkan bahwa perbankan masih berupaya menjaga akses pembiayaan bagi UMKM, namun dengan penerapan manajemen risiko yang lebih selektif. Ke depan, perbaikan kualitas kredit dan penguatan kapasitas usaha debitur UMKM menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan pada segmen UMKM.

Grafik 12. Kuadran Pemetaan Suku Bunga Kredit dan NPL Sektor Prioritas KLM



Kuadran I: suku bunga tinggi, NPL tinggi
Kuadran II: suku bunga rendah, NPL tinggi
Kuadran III: suku bunga rendah, NPL rendah
Kuadran IV: suku bunga tinggi, NPL rendah

Keterangan:

Ukuran *bubbles* menunjukkan pangsa kredit.

Arah panah pada *bubbles* menunjukkan pergerakan dari Desember 2025 ke Juni 2026

Sumber: LBUT Antasena (diolah)

Tujuan dari transparansi asesmen SBDK adalah untuk memperkuat transmisi kebijakan moneter dan juga mendukung kebijakan makroprudensial Bank Indonesia (BI). Melalui transparansi, masyarakat dan dunia usaha dapat memperoleh informasi terkait dengan perkembangan suku bunga dasar kredit perbankan dan suku bunga kredit yang ditawarkan oleh perbankan. Transmisi suku bunga kebijakan yang lebih baik ke suku bunga kredit melalui penetapan suku bunga kredit yang kompetitif dan efisien, diharapkan dapat menopang permintaan kredit dalam rangka mendukung perekonomian.

Sebagai salah satu upaya, BI menyusun publikasi “Asesmen Transmisi Suku Bunga Kebijakan kepada Suku Bunga Dasar Kredit Perbankan.” Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pembentukan suku bunga dasar kredit perbankan yakni Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK), biaya *overhead* (OHC), dan margin keuntungan. Publikasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada publik mengenai gambaran umum atas suku bunga dasar kredit perbankan Indonesia. Melalui publikasi ini, disamping mendorong transmisi kebijakan moneter, BI juga berupaya untuk memperluas diseminasi informasi kepada masyarakat baik korporasi maupun rumah tangga. Selain itu, publikasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan tata kelola, disiplin pasar, dan kompetisi dalam pembentukan suku bunga dasar kredit perbankan sehingga suku bunga dasar kredit yang ditawarkan oleh perbankan dapat lebih kompetitif guna mendorong permintaan kredit dalam rangka mendukung perekonomian nasional.

Publikasi SBDK ini merupakan salah satu praktik (*best practices*) di dunia internasional. Bank sentral negara lain seperti di Malaysia, India, dan Tiongkok juga memiliki kebijakan transparansi suku bunga kredit melalui publikasi *External Benchmark Rate*, *Loan Prime Rate*, dan *Base Rate*. Sementara itu IMF juga meminta setiap negara anggota untuk menyampaikan *Reference Lending Rate* dan *Reference Deposit Rate* untuk dipublikasikan sebagai selisih referensi suku bunga pinjaman terhadap suku bunga simpanan, yang merupakan salah satu *Financial Soundness Indicator* (FSI).